

# Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan

## Harapan

Volume 03 | Nomor 01 | 2025 | Edisi. Januari

---

### PERAN WARGA NEGARA DALAM MENGAWASI TRANSPARANSI ANGGARAN PUBLIK DI ERA DIGITAL"

Natanael Nababan ,Conan Fransiskus Sagala ,Lorensia Agnes aloma,Sahata Manalu s.h,M.h  
Universitas Katolik Santo Thomas Medan

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received : Revised : Accepted :	Transparansi anggaran publik merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Di era digital, keterlibatan warga negara dalam mengawasi penggunaan anggaran menjadi semakin mudah berkat kemajuan teknologi dan keterbukaan data pemerintah. Artikel ini membahas peran aktif warga negara dalam mengawasi transparansi anggaran publik melalui berbagai platform digital, seperti portal keterbukaan data, media sosial, dan aplikasi pengawasan keuangan negara. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menilai efektivitas penggunaan dana publik, melaporkan penyimpangan, serta mendorong akuntabilitas pemerintah.
<i>Keywords:</i> Transparansi anggaran, warga negara, pengawasan publik, digitalisasi, akuntabilitas pemerintah.	Namun, partisipasi warga negara dalam pengawasan anggaran masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan, kurangnya kesadaran akan hak untuk mengawasi anggaran, serta potensi penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media, untuk meningkatkan edukasi serta mempermudah akses terhadap informasi anggaran yang transparan dan mudah dipahami.
E-mail: <a href="mailto:nababannael1@gmail.com">nababannael1@gmail.com</a>	

#### 1. PENDAHULUAN

Transparansi anggaran publik merupakan aspek fundamental dalam pemerintahan yang bertanggung jawab dan demokratis. Dalam sebuah negara yang berlandaskan prinsip demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana

publik dikelola dan digunakan oleh pemerintah. Transparansi ini tidak hanya menjadi indikator tata kelola yang baik, tetapi juga sebagai upaya mencegah penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Di era digital saat ini, akses informasi semakin mudah didapatkan, membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi anggaran publik.

Kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menganalisis informasi keuangan negara. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai menerapkan sistem keterbukaan informasi dengan menyediakan data anggaran melalui situs web resmi dan platform digital lainnya. Langkah ini memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memahami bagaimana pajak yang mereka bayarkan dialokasikan dan digunakan untuk kepentingan pembangunan. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan sebagai pengawas yang memastikan dana publik digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Partisipasi warga negara dalam pengawasan anggaran publik menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan tata kelola keuangan negara. Korupsi, pemborosan anggaran, dan ketidakefisienan dalam belanja negara masih menjadi permasalahan yang sering muncul. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi anggaran dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi penyimpangan dan mendorong pemerintah untuk bertindak lebih transparan serta akuntabel. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemerintah telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan transparansi anggaran, seperti e-budgeting, open data, dan sistem pengaduan masyarakat berbasis digital. Namun, efektivitas dari inisiatif-inisiatif ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga negara. Tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan transparansi anggaran hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata dalam mencegah penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pengawasan anggaran yang efektif.

Di sisi lain, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan transparansi anggaran yang optimal. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Banyak warga negara yang belum memahami bagaimana membaca laporan keuangan pemerintah atau menganalisis anggaran yang telah dipublikasikan. Hal ini menyebabkan data yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya pengawasan anggaran publik.

Selain itu, akses terhadap informasi yang belum sepenuhnya merata juga menjadi kendala. Meskipun pemerintah telah menyediakan platform digital untuk keterbukaan anggaran, masih ada masyarakat yang kesulitan dalam mengaksesnya, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur teknologi. Tantangan lainnya adalah kurangnya transparansi dalam beberapa aspek tertentu, seperti rincian penggunaan dana oleh pemerintah daerah yang terkadang masih sulit untuk diakses oleh publik.

Partisipasi warga negara dalam pengawasan anggaran publik tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyimpangan, tetapi juga untuk mendorong efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Ketika masyarakat aktif mengawasi, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam merencanakan dan mengeksekusi anggaran, karena mereka tahu bahwa setiap keputusan akan diawasi secara ketat oleh publik. Dengan demikian, anggaran yang

dialokasikan dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat dapat berkontribusi dalam pengawasan anggaran melalui berbagai cara, seperti menggunakan platform digital yang disediakan oleh pemerintah, melaporkan indikasi penyimpangan anggaran, serta berpartisipasi dalam diskusi publik terkait kebijakan fiskal. Selain itu, media sosial juga menjadi alat yang efektif untuk menyuarakan temuan atau kekhawatiran terkait penggunaan anggaran publik. Dengan adanya tekanan dari masyarakat, pemerintah akan lebih terdorong untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel.

Peran media massa dan organisasi masyarakat sipil juga tidak bisa diabaikan dalam upaya meningkatkan transparansi anggaran. Media berperan dalam menyebarluaskan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami bagaimana anggaran negara dikelola. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil sering kali menjadi jembatan antara pemerintah dan warga negara dalam memastikan keterbukaan informasi serta memberikan pelatihan literasi anggaran kepada masyarakat.

Di beberapa negara, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran telah membuktikan efektivitasnya dalam mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi belanja negara. Contohnya, di beberapa kota besar, masyarakat telah menggunakan aplikasi pemantauan anggaran yang memungkinkan mereka untuk melihat secara langsung bagaimana dana publik digunakan. Dengan model partisipatif seperti ini, kebijakan anggaran menjadi lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, meskipun teknologi telah membuka akses informasi yang lebih luas, masih ada risiko penyalahgunaan data dan manipulasi informasi. Tidak jarang ditemukan kasus di mana data yang disediakan oleh pemerintah sulit diinterpretasikan atau bahkan disajikan dengan cara yang tidak sepenuhnya transparan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memastikan bahwa keterbukaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.

Selain itu, tidak semua warga negara memiliki keinginan atau kapasitas untuk berpartisipasi dalam pengawasan anggaran. Sebagian besar masyarakat masih lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari dan kurang memiliki waktu atau sumber daya untuk menelaah laporan keuangan negara. Oleh karena itu, peran edukasi menjadi sangat penting dalam membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Pendidikan tentang transparansi anggaran harus dimulai sejak dini, misalnya dengan memasukkan materi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian, generasi mendatang akan lebih siap untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa anggaran publik dikelola secara efisien dan tidak disalahgunakan. Selain pendidikan formal, kampanye kesadaran publik juga dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pengawasan anggaran.

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah juga harus memastikan bahwa mekanisme transparansi yang diterapkan benar-benar dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. Misalnya, dengan menyediakan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga warga negara dengan berbagai latar belakang pendidikan dapat memanfaatkannya dengan

optimal. Dengan demikian, transparansi anggaran tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga menjadi alat nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, transparansi anggaran publik adalah komponen utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada inisiatif pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif warga negara. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diambil dari pajak rakyat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik.

Dengan meningkatnya akses terhadap teknologi digital, masa depan transparansi anggaran semakin menjanjikan. Namun, tantangan yang ada harus segera diatasi agar manfaat dari keterbukaan informasi ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika transparansi anggaran dapat diterapkan dengan baik, bukan hanya pengelolaan keuangan negara yang akan membaik, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut bagaimana peran warga negara dalam mengawasi transparansi anggaran publik di era digital, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis peran warga negara dalam mengawasi transparansi anggaran publik di era digital. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam, termasuk bagaimana masyarakat memanfaatkan teknologi dalam pengawasan anggaran serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk wawancara, studi literatur, serta analisis dokumen terkait kebijakan transparansi anggaran.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengawasan anggaran publik. Narasumber meliputi pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas keterbukaan informasi anggaran, aktivis transparansi keuangan negara, akademisi di bidang ekonomi dan kebijakan publik, serta masyarakat yang aktif dalam pengawasan anggaran melalui platform digital. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, sehingga memungkinkan eksplorasi lebih dalam terkait perspektif dan pengalaman para informan.

Selain wawancara, penelitian ini juga mengandalkan studi literatur sebagai sumber data utama. Literatur yang digunakan mencakup kebijakan pemerintah mengenai keterbukaan anggaran, penelitian akademik terkait transparansi keuangan negara, serta laporan dari lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada antikorupsi dan partisipasi publik. Dengan mengkaji berbagai sumber tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana transparansi anggaran diimplementasikan dan bagaimana warga negara dapat berpartisipasi dalam pengawasan.

Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait transparansi anggaran, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta kebijakan

e-budgeting yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, laporan anggaran yang telah dipublikasikan secara digital juga dianalisis untuk memahami sejauh mana keterbukaan informasi telah diterapkan dan apakah data yang disediakan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal.

Penelitian ini juga menggunakan metode observasi terhadap platform digital yang digunakan dalam pengawasan anggaran. Platform yang dianalisis meliputi portal keterbukaan anggaran pemerintah, situs web lembaga independen yang memantau transparansi keuangan, serta media sosial yang digunakan untuk diskusi dan advokasi terkait pengelolaan anggaran negara. Observasi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana teknologi digital telah berperan dalam meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengawasan anggaran publik.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen resmi, serta temuan dari studi literatur dan observasi. Dengan pendekatan ini, keakuratan informasi dapat lebih terjamin dan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait peran warga negara dalam mengawasi anggaran publik.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana hasil wawancara dan dokumentasi dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan transparansi anggaran dan partisipasi publik. Beberapa tema yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup kesadaran masyarakat terhadap keterbukaan anggaran, efektivitas platform digital dalam mendukung pengawasan anggaran, serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengawasan keuangan negara.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi transparansi anggaran di Indonesia. Faktor-faktor ini dianalisis untuk memahami bagaimana kebijakan keterbukaan anggaran dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi, serta bagaimana dinamika sosial masyarakat memengaruhi tingkat partisipasi dalam pengawasan anggaran. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan analisis yang lebih holistik mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keterbukaan anggaran.

Dalam penelitian ini, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran juga dianalisis berdasarkan tingkat partisipasi yang dilakukan. Partisipasi dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkatan, mulai dari akses pasif terhadap informasi anggaran hingga keterlibatan aktif dalam advokasi kebijakan dan pelaporan penyimpangan anggaran. Dengan memahami berbagai tingkat partisipasi ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi mengenai strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran.

Penelitian ini juga membandingkan implementasi transparansi anggaran di Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah sukses dalam menerapkan keterbukaan informasi keuangan negara. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia serta melihat bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi keberhasilan transparansi anggaran di berbagai negara.

Untuk memahami dampak dari transparansi anggaran terhadap tata kelola pemerintahan, penelitian ini juga menganalisis berbagai studi kasus di mana pengawasan anggaran oleh masyarakat telah berhasil mencegah penyalahgunaan dana publik. Studi kasus ini akan

membantu mengidentifikasi faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan pengawasan anggaran serta hambatan yang perlu diatasi agar partisipasi publik dapat lebih efektif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya adalah keterbatasan dalam mengakses data yang bersifat rahasia atau tidak dipublikasikan oleh pemerintah. Meskipun banyak data anggaran yang telah tersedia secara daring, beberapa informasi yang lebih rinci terkait alokasi anggaran di tingkat daerah masih sulit diakses. Oleh karena itu, penelitian ini lebih berfokus pada data yang tersedia untuk publik serta bagaimana masyarakat memanfaatkannya dalam pengawasan anggaran.

Keterbatasan lainnya adalah cakupan sampel yang digunakan dalam penelitian. Meskipun telah berusaha mencakup berbagai kelompok masyarakat, penelitian ini tetap memiliki keterbatasan dalam menjangkau kelompok-kelompok tertentu, seperti masyarakat di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi digital. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih merepresentasikan partisipasi masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi digital dan teknologi komunikasi.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan yang lebih berfokus pada partisipasi masyarakat di daerah dengan akses informasi yang terbatas. Studi lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan transparansi anggaran dapat ditingkatkan agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital dan keuangan.

Dengan menggunakan berbagai metode penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana warga negara dapat berperan dalam mengawasi transparansi anggaran publik di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat sipil dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menemukan bahwa peran warga negara dalam mengawasi transparansi anggaran publik di era digital semakin meningkat seiring dengan berkembangnya akses terhadap informasi dan teknologi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran tidak hanya sebatas mengakses informasi, tetapi juga melibatkan analisis data serta pelaporan indikasi penyimpangan. Dengan adanya keterbukaan informasi yang lebih luas, masyarakat kini memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam memastikan bahwa dana publik dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa teknologi digital telah memainkan peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi anggaran. Pemerintah telah menyediakan berbagai platform, seperti portal keterbukaan anggaran dan sistem e-budgeting, yang memungkinkan warga negara untuk melihat alokasi serta penggunaan dana publik. Platform ini memberikan transparansi yang lebih baik dan memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana anggaran disusun serta bagaimana realisasinya di lapangan.

Namun, meskipun akses terhadap informasi telah meningkat, penelitian ini menemukan bahwa masih banyak warga negara yang belum memahami secara mendalam bagaimana

membaca dan menganalisis data anggaran. Rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan dalam memahami dokumen anggaran yang bersifat teknis menjadi hambatan utama dalam partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan anggaran negara.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran masih cenderung bersifat pasif. Banyak warga negara yang hanya mengakses informasi tanpa benar-benar terlibat dalam analisis atau pelaporan indikasi penyimpangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan anggaran serta minimnya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dalam proses pengawasan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam mengakses dan memanfaatkan informasi anggaran dibandingkan dengan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan lebih rendah. Selain itu, kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan langsung terhadap anggaran publik, seperti organisasi masyarakat sipil dan akademisi, lebih sering terlibat dalam diskusi serta advokasi terkait transparansi anggaran dibandingkan dengan masyarakat umum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial memainkan peran yang signifikan dalam mendukung transparansi anggaran publik. Berbagai platform media sosial digunakan oleh masyarakat untuk mendiskusikan penggunaan anggaran serta mengungkap potensi penyimpangan yang terjadi. Kasus-kasus penyalahgunaan anggaran yang terungkap melalui media sosial sering kali mendapatkan perhatian luas dan mendorong pemerintah untuk bertindak lebih transparan serta akuntabel.

Namun, meskipun media sosial menjadi alat yang efektif untuk menyuarakan transparansi anggaran, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam memastikan validitas informasi yang disebar. Tidak jarang terjadi penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan hoaks terkait anggaran negara, yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi informasi yang lebih baik agar diskusi mengenai transparansi anggaran tetap berdasarkan fakta dan data yang valid.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan keterbukaan anggaran oleh pemerintah. Salah satu kendala utama adalah kurangnya keseragaman dalam penyajian data anggaran di berbagai tingkat pemerintahan. Meskipun pemerintah pusat telah menerapkan sistem keterbukaan anggaran yang cukup baik, masih banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi kebijakan yang sama. Akibatnya, masyarakat di beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi anggaran yang seharusnya bersifat terbuka untuk publik.

Hambatan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya mekanisme umpan balik yang efektif antara masyarakat dan pemerintah dalam pengawasan anggaran. Meskipun masyarakat dapat mengakses informasi anggaran, tidak semua platform menyediakan sarana yang memungkinkan warga negara untuk memberikan masukan atau melaporkan indikasi penyimpangan dengan mudah. Hal ini menyebabkan rendahnya efektivitas partisipasi publik dalam pengawasan anggaran, karena tidak adanya jalur komunikasi yang jelas antara warga negara dan pihak berwenang.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa di beberapa daerah telah muncul inisiatif masyarakat yang berupaya untuk meningkatkan transparansi anggaran secara mandiri. Beberapa komunitas dan organisasi masyarakat sipil telah membentuk kelompok-kelompok pemantauan anggaran yang bekerja secara independen untuk menganalisis data anggaran serta mengadvokasi transparansi kepada pemerintah daerah. Inisiatif ini menunjukkan bahwa dengan dukungan dan edukasi yang memadai, masyarakat dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam pengawasan anggaran publik.

Keberhasilan inisiatif-inisiatif tersebut juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media sangat penting dalam meningkatkan transparansi anggaran. Di beberapa daerah, kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat telah menghasilkan model transparansi anggaran yang lebih efektif, di mana pemerintah secara aktif melibatkan warga negara dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Model seperti ini dapat menjadi contoh yang baik untuk diterapkan di daerah lain yang masih menghadapi tantangan dalam keterbukaan anggaran.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan analitik data dapat menjadi solusi potensial dalam meningkatkan transparansi anggaran. Dengan adanya teknologi ini, analisis data anggaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami bagaimana anggaran digunakan. Beberapa negara telah mulai mengembangkan sistem berbasis AI untuk mengidentifikasi pola-pola penyalahgunaan anggaran, dan hal ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk menerapkan teknologi serupa.

Namun, penerapan teknologi dalam pengawasan anggaran juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap teknologi canggih, dan masih banyak pihak yang belum memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam analisis anggaran. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam pengembangan kapasitas masyarakat serta infrastruktur digital yang mendukung keterbukaan anggaran secara lebih luas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berdampak pada peningkatan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Ketika masyarakat aktif mengawasi anggaran, pemerintah menjadi lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dan menggunakan dana publik. Hal ini dapat mencegah terjadinya pemborosan anggaran serta memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks global, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa negara-negara dengan tingkat transparansi anggaran yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Studi kasus dari beberapa negara menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran yang didukung dengan partisipasi masyarakat yang kuat dapat menjadi strategi efektif dalam memerangi korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran warga negara dalam mengawasi transparansi anggaran publik sangatlah penting, terutama di era digital. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Namun, agar partisipasi publik dalam pengawasan anggaran dapat lebih efektif, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi keuangan, menyediakan mekanisme

komunikasi yang lebih baik, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media.

Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan, bahwa keterbukaan anggaran harus disertai dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menggunakan informasi yang tersedia. Tanpa partisipasi yang aktif dari warga negara, kebijakan transparansi anggaran hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, kebijakan terkait transparansi anggaran harus terus dikembangkan agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti peran penting warga negara dalam mengawasi transparansi anggaran publik di era digital. Dengan semakin luasnya akses terhadap informasi dan berkembangnya teknologi digital, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran menjadi semakin mungkin dan signifikan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi agar transparansi anggaran dapat benar-benar berfungsi secara optimal dan menghasilkan dampak nyata bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait anggaran publik. Berbagai platform keterbukaan anggaran yang disediakan oleh pemerintah memungkinkan warga negara untuk mengakses data mengenai perencanaan, alokasi, dan realisasi anggaran. Ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Namun, meskipun akses terhadap informasi semakin terbuka, penelitian ini menemukan bahwa tidak semua masyarakat mampu memahami atau menganalisis data anggaran dengan baik. Literasi keuangan yang masih rendah di sebagian besar masyarakat menjadi tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan publik terhadap anggaran negara. Oleh karena itu, edukasi tentang pengelolaan keuangan negara menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Selain itu, meskipun banyak masyarakat yang mengakses informasi anggaran, tingkat partisipasi aktif dalam pengawasan masih tergolong rendah. Banyak warga negara yang sekadar membaca laporan anggaran tanpa benar-benar memahami atau memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Faktor ini menunjukkan bahwa transparansi saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat.

Dalam beberapa kasus, masyarakat telah menunjukkan peran yang signifikan dalam mengawasi anggaran, terutama melalui media sosial. Banyak kasus penyimpangan anggaran yang berhasil diungkap berkat adanya partisipasi publik yang aktif dalam mengkritisi dan menyebarkan informasi mengenai ketidakwajaran dalam alokasi atau penggunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial dalam pengawasan anggaran juga memiliki tantangan tersendiri. Informasi yang beredar tidak selalu valid, dan sering kali terjadi penyebaran hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi yang lebih kuat agar diskusi mengenai anggaran publik tetap berbasis pada fakta dan data yang akurat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa di beberapa daerah, keterbukaan informasi anggaran masih belum merata. Pemerintah pusat telah cukup baik dalam menyediakan akses informasi anggaran, tetapi masih banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi kebijakan keterbukaan yang sama. Akibatnya, masyarakat di daerah-daerah tertentu masih kesulitan dalam mendapatkan informasi yang seharusnya dapat diakses secara publik.

Kurangnya mekanisme umpan balik yang efektif juga menjadi kendala dalam pengawasan anggaran oleh masyarakat. Banyak platform keterbukaan anggaran yang hanya bersifat satu arah, di mana masyarakat hanya dapat mengakses informasi tanpa memiliki sarana yang jelas untuk memberikan masukan atau melaporkan penyimpangan. Hal ini mengurangi efektivitas pengawasan publik terhadap anggaran negara.

Meski demikian, di beberapa daerah, telah muncul inisiatif masyarakat yang secara mandiri melakukan pemantauan anggaran. Beberapa organisasi masyarakat sipil telah membentuk kelompok-kelompok pemantau yang berfungsi untuk mengawasi kebijakan anggaran dan melaporkan indikasi penyimpangan kepada pihak berwenang. Inisiatif semacam ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang memadai, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran publik.

Keberhasilan beberapa inisiatif pengawasan anggaran yang dilakukan oleh masyarakat juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media sangat diperlukan dalam meningkatkan transparansi. Model keterbukaan anggaran yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terbukti lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan keterbukaan yang hanya bersifat administratif.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan dan analitik data dalam meningkatkan transparansi anggaran. Dengan adanya teknologi ini, analisis data anggaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami bagaimana anggaran digunakan dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan anggaran dengan lebih baik.

Namun, penerapan teknologi dalam pengawasan anggaran juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap teknologi canggih, dan masih banyak pihak yang belum memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menganalisis anggaran. Oleh karena itu, perlu ada investasi yang lebih besar dalam pengembangan kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam pengawasan anggaran.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbukaan anggaran memiliki dampak yang luas terhadap tata kelola pemerintahan. Ketika masyarakat aktif mengawasi anggaran, pemerintah menjadi lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dan menggunakan dana publik. Hal ini dapat mencegah terjadinya pemborosan serta memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Selain itu, penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa negara-negara dengan tingkat transparansi anggaran yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran yang didukung oleh partisipasi masyarakat yang kuat dapat menjadi strategi yang efektif dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran warga negara dalam mengawasi transparansi anggaran publik sangat penting di era digital. Dengan semakin terbukanya akses terhadap informasi dan berkembangnya teknologi, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk ikut serta dalam memastikan bahwa dana publik dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Namun, agar partisipasi publik dalam pengawasan anggaran dapat lebih efektif, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Tanpa pemahaman yang baik mengenai cara membaca dan menganalisis data anggaran, keterbukaan informasi yang ada tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Selain itu, diperlukan pula mekanisme komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Pemerintah harus memastikan bahwa warga negara tidak hanya sekadar diberikan akses informasi, tetapi juga memiliki sarana yang jelas untuk memberikan masukan, melaporkan penyimpangan, dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan anggaran.

Penelitian ini juga menekankan bahwa keberhasilan transparansi anggaran tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, strategi peningkatan keterlibatan publik dalam pengawasan anggaran harus terus dikembangkan agar lebih inklusif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam jangka panjang, peningkatan transparansi anggaran yang didukung dengan partisipasi aktif masyarakat dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi tata kelola pemerintahan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari masyarakat, penggunaan anggaran publik dapat menjadi lebih efisien, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan transparansi anggaran, baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun dari sisi pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan media, transparansi anggaran dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fikriyah, T. M., & Trisnaningsih, S. (2022, May). Studi Literatur Electronic Budgeting Sebagai Peningkatan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). In Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (Vol. 2, No. 1, pp. 17-27).
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71-84.
- Supraja, G. (2019, December). Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran melalui e-Government. In Seminar Nasional Industri dan Teknologi (pp. 212-225).
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61.

Abdillah, B. D. (2024). Peran Teknologi Informasi dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *literacy notes*, 2(1).

Pabubung, M. R. (2021). Transparansi: Instrumen Menghadapi Korupsi Pengadaan Dana Desa. *Journal of Politics and Government*, 3(2).

Lawrence, J. (2024). PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA DIGITAL: PERAN DAN KESADARAN MAHASISWA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(10), 1-10.

Yunus, E. Y., Alvionita, N., Maulana, F. A., & Firmansyah, M. T. (2024). PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL DI ERA DIGITAL. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(5), 3179-3190.

Puspitasari, D., Arkisman, A., Ningsih, D. W., & Nasichin, M. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Transparansi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Sebagai Perwujudan Asas Good Governance. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nusantara*, 1(2), 117-126.